



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai perubahan kelas jabatan struktural maka Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/214/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrator di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/217/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/276/M.SM.02.00/2024 tanggal 16 April 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan kelas jabatan untuk jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Mencabut Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada Angka Romawi I Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.

KETIGA : Bagi pegawai yang telah diangkat dalam kelas jabatan struktural sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa

Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka kelas jabatannya menyesuaikan terhitung sejak dikeluarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/214/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrator di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor: B/217/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, dan Nomor: B/276/M.SM.02.00/2024 tanggal 16 April 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga maka selisih tunjangan kinerja dibayarkan sejak dikeluarkan surat persetujuan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KELAS JABATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
I	JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI	
A	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	
	1. Wakil Jaksa Agung	18
	2. Jaksa Agung Muda Pembinaan	17
	3. Jaksa Agung Muda Intelijen	
	4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	
	5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	
	6. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	
	7. Jaksa Agung Muda Pidana Militer	
	8. Jaksa Agung Muda Pengawasan	
	9. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	
	10. Staf Ahli	16
B	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
	1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan	15
	2. Kepala Biro Perencanaan	
	3. Kepala Biro Umum	
	4. Kepala Biro Kepegawaian	
	5. Kepala Biro Keuangan	
	6. Kepala Biro Perlengkapan	
	7. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri	
	8. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen	
	9. Direktur Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (A)	
	10. Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (B)	
	11. Direktur Ekonomi dan Keuangan (C)	
	12. Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (D)	
	13. Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen (E)	
	14. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	
	15. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
16.	Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya	15
17.	Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	
18.	Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara	
19.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	
20.	Direktur Penyidikan	
21.	Direktur Penuntutan (Tindak Pidana Khusus)	
22.	Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (Tindak Pidana Khusus)	
23.	Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	
24.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	
25.	Direktur Perdata	
26.	Direktur Tata Usaha Negara	
27.	Direktur Pertimbangan Hukum	
28.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer	
29.	Direktur Penindakan	
30.	Direktur Penuntutan (Pidana Militer)	
31.	Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi (Pidana Militer)	
32.	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan	
33.	Inspektur I	
34.	Inspektur II	
35.	Inspektur III	
36.	Inspektur IV	
37.	Inspektur V	
38.	Inspektur Keuangan	
39.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan	
40.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	
41.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	
42.	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	
43.	Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	
44.	Kepala Pusat Penerangan Hukum	
45.	Kepala Pusat Pemulihan Aset	
46.	Kepala Kejaksaan Tinggi	
47.	Asisten Umum Jaksa Agung	
48.	Asisten Khusus Jaksa Agung	
49.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	
50.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	
51.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	
52.	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	
53.	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
C	JABATAN ADMINISTRATOR	
1.	Kepala Kejaksaan Negeri	13
2.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pembinaan)	
3.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pembinaan)	
4.	Kepala Bagian Pengelolaan Data (Biro Perencanaan)	
5.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja (Biro Perencanaan)	
6.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi (Biro Perencanaan)	
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Biro Perencanaan)	
8.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)	
9.	Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan (Biro Umum)	
10.	Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Biro Umum)	
11.	Kepala Bagian Keamanan Dalam (Biro Umum)	
12.	Kepala Bagian Kesehatan dan Pembinaan Rohani (Biro Umum)	
13.	Kepala Bagian Rumah Tangga (Biro Umum)	
14.	Kepala Bagian Umum (Biro Kepegawaian)	
15.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai (Biro Kepegawaian)	
16.	Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi (Biro Kepegawaian)	
17.	Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun (Biro Kepegawaian)	
18.	Kepala Bagian Perbendaharaan (Biro Keuangan)	
19.	Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara (Biro Keuangan)	
20.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Biro Keuangan)	
21.	Kepala Bagian Umum Keuangan (Biro Keuangan)	
22.	Kepala Bagian Analisis Kebutuhan (Biro Perlengkapan)	
23.	Kepala Bagian Pengadaan (Biro Perlengkapan)	
24.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (Biro Perlengkapan)	
25.	Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
26.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
27.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
28.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Intelijen)	
29.	Kepala Bagian Tata Usaha (Intelijen)	
30.	Kepala Bagian Keuangan (Intelijen)	
31.	Kepala Subdirektorat Ideologi (Direktorat A)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
32.	Kepala Subdirektorat Politik (Direktorat A)	13
33.	Kepala Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan (Direktorat A)	
34.	Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara (Direktorat A)	
35.	Kepala Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi (Direktorat B)	
36.	Kepala Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan, serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (Direktorat B)	
37.	Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan (Direktorat B)	
38.	Kepala Subdirektorat Sosial, Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Direktorat B)	
39.	Kepala Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara (Direktorat C)	
40.	Kepala Subdirektorat Investasi dan Penerimaan Negara (Direktorat C)	
41.	Kepala Subdirektorat Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Direktorat C)	
42.	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Agraria atau Tata Ruang (Direktorat C)	
43.	Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi (Direktorat D)	
44.	Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan (Direktorat D)	
45.	Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Direktorat D)	
46.	Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya (Direktorat D)	
47.	Kepala Subdirektorat Produksi Intelijen (Direktorat E)	
48.	Kepala Subdirektorat Pemantauan (Direktorat E)	
49.	Kepala Subdirektorat Pengamanan Informasi (Direktorat E)	
50.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi (Direktorat E)	
51.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Tindak Pidana Umum)	
52.	Kepala Bagian Tata Usaha (Tindak Pidana Umum)	
53.	Kepala Bagian Keuangan (Tindak Pidana Umum)	
54.	Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
55.	Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
56.	Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Benda)	13
57.	Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
58.	Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
59.	Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
60.	Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
61.	Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
62.	Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
63.	Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
64.	Kepala Subdirektorat Penuntutan (Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
65.	Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
66.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Tindak Pidana Khusus)	
67.	Kepala Bagian Tata Usaha (Tindak Pidana Khusus)	
68.	Kepala Bagian Keuangan (Tindak Pidana Khusus)	
69.	Kepala Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat (Direktorat Penyidikan)	
70.	Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penyidikan)	
71.	Kepala Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Direktorat Penyidikan)	
72.	Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penuntutan)	
73.	Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penuntutan)	
74.	Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Penuntutan)	
75.	Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
76.	Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
77.	Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
78.	Kepala Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
79.	Kepala Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	13
80.	Kepala Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	
81.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
82.	Kepala Bagian Tata Usaha (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
83.	Kepala Bagian Keuangan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
84.	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Penyelamatan (Direktorat Perdata)	
85.	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Pemulihan (Direktorat Perdata)	
86.	Kepala Subdirektorat Arbitrase (Direktorat Perdata)	
87.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Direktorat Perdata)	
88.	Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara (Direktorat Tata Usaha Negara)	
89.	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pemerintahan (Direktorat Tata Usaha Negara)	
90.	Kepala Subdirektorat Uji Materil (Direktorat Tata Usaha Negara)	
91.	Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum (Direktorat Tata Usaha Negara)	
92.	Kepala Subdirektorat Pendapat Hukum (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
93.	Kepala Subdirektorat Pendampingan dan Audit Hukum (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
94.	Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
95.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Pidana Militer)	
96.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawasan (Pidana Militer)	
97.	Kepala Bagian Keuangan (Pidana Militer)	
98.	Kepala Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas (Direktorat Penindakan)	
99.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Penindakan (Direktorat Penindakan)	
100.	Kepala Subdirektorat Penuntutan Perkara Koneksitas (Direktorat Penuntutan)	
101.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Penuntutan (Direktorat Penuntutan)	
102.	Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas (Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
103.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi (Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
104.	Kepala Bagian Program, Laporan dan Penilaian (Pengawasan)	13
105.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pengawasan)	
106.	Kepala Bagian Keuangan (Pengawasan)	
107.	Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat I)	
108.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat I)	
109.	Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat I)	
110.	Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat II)	
111.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat II)	
112.	Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat II)	
113.	Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat III)	
114.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat III)	
115.	Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat III)	
116.	Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat IV)	
117.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat IV)	
118.	Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat IV)	
119.	Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat V)	
120.	Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (Inspektorat V)	
121.	Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Inspektorat V)	
122.	Inspektur Muda I (Inspektorat Keuangan)	
123.	Inspektur Muda II (Inspektorat Keuangan)	
124.	Inspektur Muda III (Inspektorat Keuangan)	
125.	Inspektur Muda IV (Inspektorat Keuangan)	
126.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
127.	Kepala Bagian Tata Usaha (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
128.	Kepala Bagian Keuangan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
129.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
130.	Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
131.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
132.	Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusat Pendidikan dan	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Pelatihan Teknis Fungsional)	13
133.	Kepala Bidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
134.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	
135.	Kepala Bidang Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	
136.	Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	
137.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
138.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
139.	Kepala Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
140.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Penerangan Hukum)	
141.	Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum (Pusat Penerangan Hukum)	
142.	Kepala Bidang Media dan Kehumasan (Pusat Penerangan Hukum)	
143.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga (Pusat Penerangan Hukum)	
144.	Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Pemulihan Aset)	
145.	Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional (Pusat Pemulihan Aset)	
146.	Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional (Pusat Pemulihan Aset)	
147.	Kepala Bidang <i>Database</i> dan Pertukaran Informasi (Pusat Pemulihan Aset)	
148.	Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Pusat Pemulihan Aset)	
149.	Kepala Bagian Tata Usaha (RSU Adhyaksa)	
150.	Kepala Bidang Pelayanan Medik (RSU Adhyaksa)	
151.	Kepala Bidang Penunjang Medik (RSU Adhyaksa)	
152.	Asisten Bidang Pembinaan (Kejaksaan Tinggi)	
153.	Asisten Bidang Intelijen (Kejaksaan Tinggi)	
154.	Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Kejaksaan Tinggi)	
155.	Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Kejaksaan Tinggi)	
156.	Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Tinggi)	
157.	Asisten Bidang Pidana Militer (Kejaksaan Tinggi)	
158.	Asisten Bidang Pengawasan (Kejaksaan Tinggi)	
159.	Kepala Bagian Tata Usaha (Kejaksaan Tinggi)	
160.	Koordinator (Kejaksaan Tinggi)	12

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
D	JABATAN PENGAWAS	
1.	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri	10
2.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pembinaan)	9
3.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pembinaan)	
4.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pembinaan)	
5.	Kepala Subbagian Umum (Pembinaan)	
6.	Kepala Subbagian Keuangan (Pembinaan)	
7.	Kepala Subbagian Pengelolaan Data I (Biro Perencanaan)	
8.	Kepala Subbagian Pengelolaan Data II (Biro Perencanaan)	
9.	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I (Biro Perencanaan)	
10.	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II (Biro Perencanaan)	
11.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I (Biro Perencanaan)	
12.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II (Biro Perencanaan)	
13.	Kepala Subbagian Kelembagaan (Biro Perencanaan)	
14.	Kepala Subbagian Tata Laksana (Biro Perencanaan)	
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perencanaan)	
16.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)	
17.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)	
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha Jaksa Agung (Biro Umum)	
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli (Biro Umum)	
20.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Biro Umum)	
21.	Kepala Subbagian Produksi dan Distribusi (Biro Umum)	
22.	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung (Biro Umum)	
23.	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung (Biro Umum)	
24.	Kepala Subbagian Tata Tertib (Biro Umum)	
25.	Kepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Objek Khusus (Biro Umum)	
26.	Kepala Subbagian Pelayanan dan Penunjang Kesehatan (Biro Umum)	
27.	Kepala Subbagian Pembinaan Rohani (Biro Umum)	
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum (Biro Umum)	
29.	Kepala Subbagian Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Khusus (Biro Umum)	
30.	Kepala Subbagian Angkutan (Biro Umum)	
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Kepegawaian)	
32.	Kepala Subbagian Data Kepegawaian (Biro Kepegawaian)	
33.	Kepala Subbagian Peraturan Kepegawaian (Biro	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Kepegawaian)	9
34.	Kepala Subbagian Pengadaan Pegawai (Biro Kepegawaian)	
35.	Kepala Subbagian Jenjang Karir (Biro Kepegawaian)	
36.	Kepala Subbagian Kekayaan, Perizinan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian)	
37.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi I (Biro Kepegawaian)	
38.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi II (Biro Kepegawaian)	
39.	Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi III (Biro Kepegawaian)	
40.	Kepala Subbagian Angka Kredit Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian)	
41.	Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun I (Biro Kepegawaian)	
42.	Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun II (Biro Kepegawaian)	
43.	Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun III (Biro Kepegawaian)	
44.	Kepala Subbagian Perbendaharaan I (Biro Keuangan)	
45.	Kepala Subbagian Perbendaharaan II (Biro Keuangan)	
46.	Kepala Subbagian Perbendaharaan III (Biro Keuangan)	
47.	Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara I (Biro Keuangan)	
48.	Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara II (Biro Keuangan)	
49.	Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara III (Biro Keuangan)	
50.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I (Biro Keuangan)	
51.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II (Biro Keuangan)	
52.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III (Biro Keuangan)	
53.	Kepala Subbagian Perjalanan Dinas (Biro Keuangan)	
54.	Kepala Subbagian Pengelolaan Gaji dan Tunjangan (Biro Keuangan)	
55.	Kepala Subbagian Penelitian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (Biro Keuangan)	
56.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Keuangan)	
57.	Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan I (Biro Perlengkapan)	
58.	Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan II (Biro Perlengkapan)	
59.	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Biro Perlengkapan)	
60.	Kepala Subbagian Pengadaan Barang (Biro Perlengkapan)	
61.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan (Biro Perlengkapan)	
62.	Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi (Biro	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Perlengkapan)	9
63.	Kepala Subbagian Penilaian (Biro Perlengkapan)	
64.	Kepala Subbagian Penghapusan (Biro Perlengkapan)	
65.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perlengkapan)	
66.	Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
67.	Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
68.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
69.	Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
70.	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
71.	Kepala Subbagian Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik dan Pemindahan Narapidana Antar Negara (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
72.	Kepala Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
73.	Kepala Subbagian Perpustakaan (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
74.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
75.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri)	
76.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Intelijen)	
77.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Intelijen)	
78.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Intelijen)	
79.	Kepala Subbagian Umum (Intelijen)	
80.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Intelijen)	
81.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Intelijen)	
82.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat A)	
83.	Kepala Seksi Pengamanan Pancasila, Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Direktorat A)	
84.	Kepala Seksi Gerakan Separatis (Direktorat A)	
85.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan (Direktorat A)	
86.	Kepala Seksi Partai Politik, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Direktorat A)	
87.	Kepala Seksi Gerakan Teroris dan Radikal (Direktorat A)	
88.	Kepala Seksi Pengawasan Wilayah Teritorial dan Kejahatan Siber (Direktorat A)	
89.	Kepala Seksi Cegah Tangkal dan Pengawasan Orang Asing (Direktorat A)	
90.	Kepala Seksi Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan Perkara (Direktorat A)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
91.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat B)	9
92.	Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Barang Cetak (Direktorat B)	
93.	Kepala Seksi Pengawasan Media Komunikasi (Direktorat B)	
94.	Kepala Seksi Pengawasan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Direktorat B)	
95.	Kepala Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (Direktorat B)	
96.	Kepala Seksi Ketahanan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Direktorat B)	
97.	Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Direktorat B)	
98.	Kepala Seksi Pencegahan Konflik Sosial dan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Direktorat B)	
99.	Kepala Seksi Ketertiban dan Ketenteraman Umum (Direktorat B)	
100.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat C)	
101.	Kepala Seksi Lembaga Keuangan dan Moneter (Direktorat C)	
102.	Kepala Seksi Keuangan Negara dan Penelusuran Aset (Direktorat C)	
103.	Kepala Seksi Investasi (Direktorat C)	
104.	Kepala Seksi Penerimaan Negara (Direktorat C)	
105.	Kepala Seksi Perdagangan (Direktorat C)	
106.	Kepala Seksi Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Direktorat C)	
107.	Kepala Seksi Sumber Daya Alam (Direktorat C)	
108.	Kepala Seksi Lingkungan Hidup dan Agraria atau Tata Ruang (Direktorat C)	
109.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat D)	
110.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi (Direktorat D)	
111.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi (Direktorat D)	
112.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan dan Pertanian (Direktorat D)	
113.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kelautan (Direktorat D)	
114.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam (Direktorat D)	
115.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Direktorat D)	
116.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan (Direktorat D)	
117.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Sektor Strategis Lainnya (Direktorat D)	
118.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat E)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
119.	Kepala Seksi Produksi Intelijen Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan (Direktorat E)	9
120.	Kepala Seksi Produksi Intelijen Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat E)	
121.	Kepala Seksi <i>Lawful Interception</i> , Intelijen Sinyal, dan Klandestin (Direktorat E)	
122.	Kepala Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik (Direktorat E)	
123.	Kepala Seksi Transmisi Berita Sandi (Direktorat E)	
124.	Kepala Seksi Kontra Penginderaan, Kontra Intelijen, Audit, dan Pengujian Sistem Keamanan Informasi (Direktorat E)	
125.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi dan Sumber Daya Manusia Lainnya (Direktorat E)	
126.	Kepala Seksi Teknologi, Prosedur dan Aplikasi (Direktorat E)	
127.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Tindak Pidana Umum)	
128.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Tindak Pidana Umum)	
129.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Tindak Pidana Umum)	
130.	Kepala Subbagian Umum (Tindak Pidana Umum)	
131.	Kepala Subbagian Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Tindak Pidana Umum)	
132.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Tindak Pidana Umum)	
133.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Tindak Pidana Umum)	
134.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
135.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
136.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
137.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
138.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
139.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
140.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda)	
141.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
142.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	9
143.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
144.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
145.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
146.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
147.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya)	
148.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
149.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
150.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
151.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
152.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
153.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
154.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)	
155.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
156.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
157.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
158.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
159.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
160.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	dan Lintas Negara)	9
161.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara)	
162.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Tindak Pidana Khusus)	
163.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Tindak Pidana Khusus)	
164.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Tindak Pidana Khusus)	
165.	Kepala Subbagian Umum (Tindak Pidana Khusus)	
166.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Tindak Pidana Khusus)	
167.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Tindak Pidana Khusus)	
168.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penyidikan)	
169.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Penyidikan)	
170.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Penyidikan)	
171.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Penyidikan)	
172.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
173.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
174.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan)	
175.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Penyidikan)	
176.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Penyidikan)	
177.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Penyidikan)	
178.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penuntutan)	
179.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
180.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
181.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
182.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
183.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	9
184.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
185.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
186.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
187.	Kepala Seksi Wilayah III (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan)	
188.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
189.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
190.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
191.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
192.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi)	
193.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
194.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi)	
195.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	
196.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	
197.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	
198.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	
199.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat Pelanggaran	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Hak Asasi Manusia Berat)	9
200.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	
201.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat)	
202.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
203.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
204.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
205.	Kepala Subbagian Umum (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
206.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
207.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Perdata dan Tata Usaha Negara)	
208.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Perdata)	
209.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Penyelamatan pada Direktorat Perdata)	
210.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Bantuan Hukum Penyelamatan pada Direktorat Perdata)	
211.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Pemulihan pada Direktorat Perdata)	
212.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Bantuan Hukum Pemulihan pada Direktorat Perdata)	
213.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Arbitrase pada Direktorat Perdata)	
214.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Arbitrase pada Direktorat Perdata)	
215.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata)	
216.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata)	
217.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Tata Usaha Negara)	
218.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Tata Usaha Negara pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
219.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Bantuan Hukum Tata Usaha Negara pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
220.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Penyelenggaraan Pemerintahan pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
221.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Penyelenggaraan Pemerintahan pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
222.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Uji Materiil pada Direktorat Tata Usaha Negara)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
223.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Uji Materil pada Direktorat Tata Usaha Negara)	9
224.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Pelayanan Hukum pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
225.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Pelayanan Hukum pada Direktorat Tata Usaha Negara)	
226.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Pertimbangan Hukum)	
227.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Pendapat Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
228.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Pendapat Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
229.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Pendampingan dan Audit Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
230.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Pendampingan dan Audit Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
231.	Kepala Seksi Analisis (Subdit Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
232.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan (Subdit Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum)	
233.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pidana Militer)	
234.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pidana Militer)	
235.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pidana Militer)	
236.	Kepala Subbagian Umum (Pidana Militer)	
237.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengamanan dan Pengawasan (Pidana Militer)	
238.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pidana Militer)	
239.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pidana Militer)	
240.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penindakan)	
241.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penindakan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penindakan)	
242.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penindakan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penindakan)	
243.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Koordinasi Penindakan pada Direktorat Penindakan)	
244.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Koordinasi Penindakan pada Direktorat Penindakan)	
245.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Penuntutan)	
246.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Penuntutan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penuntutan)	
247.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Penuntutan Perkara Koneksitas pada Direktorat Penuntutan)	
248.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Koordinasi Penuntutan pada Direktorat Penuntutan)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
249.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Koordinasi Penuntutan pada Direktorat Penuntutan)	9
250.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
251.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
252.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
253.	Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
254.	Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi)	
255.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pengawasan)	
256.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pengawasan)	
257.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pengawasan)	
258.	Kepala Subbagian Umum (Pengawasan)	
259.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pengawasan)	
260.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pengawasan)	
261.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat I)	
262.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat I)	
263.	Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat I)	
264.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat I)	
265.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat I)	
266.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat I)	
267.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat I)	
268.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat II)	
269.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat II)	
270.	Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat II)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
271.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat II)	9
272.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat II)	
273.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat II)	
274.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat II)	
275.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat III)	
276.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat III)	
277.	Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat III)	
278.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat III)	
279.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat III)	
280.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat III)	
281.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat III)	
282.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat IV)	
283.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat IV)	
284.	Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat IV)	
285.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat IV)	
286.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat IV)	
287.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat IV)	
288.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat IV)	
289.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat V)	
290.	Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat V)	
291.	Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat V)	
292.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat V)	
293.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat V)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
294.	Pemeriksa Intelijen (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat V)	9
295.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat V)	
296.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektur Keuangan)	
297.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud I pada Inspektorat Keuangan)	
298.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud I pada Inspektorat Keuangan)	
299.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud II pada Inspektorat Keuangan)	
300.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud II pada Inspektorat Keuangan)	
301.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud III pada Inspektorat Keuangan)	
302.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud III pada Inspektorat Keuangan)	
303.	Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Irmud IV pada Inspektorat Keuangan)	
304.	Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud IV pada Inspektorat Keuangan)	
305.	Kepala Subbagian Program (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
306.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
307.	Kepala Subbagian Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan dan Penjaminan Mutu (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
308.	Kepala Subbagian Umum (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
309.	Kepala Subbagian Persuratan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
310.	Kepala Subbagian Perlengkapan, Perpustakaan dan Dokumentasi (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
311.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
312.	Kepala Subbagian Perbendaharaan (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	
313.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
314.	Kepala Subbidang Perencanaan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
315.	Kepala Subbidang Evaluasi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
316.	Kepala Subbidang Akademis (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
317.	Kepala Subbidang Pengajaran (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan)	
318.	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
319.	Kepala Subbidang Perencanaan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
320.	Kepala Subbidang Evaluasi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	9
321.	Kepala Subbidang Akademis (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
322.	Kepala Subbidang Pengajaran (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
323.	Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
324.	Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikari dan Pelatihan Wilayah II (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional)	
325.	Kepala Subbagian Umum (Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum)	
326.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
327.	Kepala Subbagian Umum (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
328.	Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
329.	Kepala Subbidang Pengelolaan Basis Data (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
330.	Kepala Subbidang Analisis Data dan Statistik Kriminal (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
331.	Kepala Subbidang Perangkat Lunak (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
332.	Kepala Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan (Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi)	
333.	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Laporan dan Pemantauan (Pusat Penerangan Hukum)	
334.	Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Penerangan Hukum)	
335.	Kepala Subbagian Umum (Pusat Penerangan Hukum)	
336.	Kepala Subbidang Penerangan Hukum (Pusat Penerangan Hukum)	
337.	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum (Pusat Penerangan Hukum)	
338.	Kepala Subbidang Media Massa dan Media Sosial (Pusat Penerangan Hukum)	
339.	Kepala Subbidang Kehumasan (Pusat Penerangan Hukum)	
340.	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (Pusat Penerangan Hukum)	
341.	Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Nonpemerintah (Pusat Penerangan Hukum)	
342.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat Pemulihan Aset)	
343.	Kepala Subbagian Administrasi dan Persuratan (Pusat Pemulihan Aset)	
344.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan (Pusat Pemulihan Aset)	
345.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Nasional Terkait	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Tindak Pidana (Pusat Pemulihan Aset)	9
346.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Nasional Lainnya (Pusat Pemulihan Aset)	
347.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Indonesia di Luar Negeri (Pusat Pemulihan Aset)	
348.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Negara Lain di Indonesia (Pusat Pemulihan Aset)	
349.	Kepala Subbidang <i>Database</i> Pemulihan Aset (Pusat Pemulihan Aset)	
350.	Kepala Subbidang Pertukaran Informasi (Pusat Pemulihan Aset)	
351.	Kepala Subbidang Benda Sitaan (Pusat Pemulihan Aset)	
352.	Kepala Subbidang Barang Rampasan Negara (Pusat Pemulihan Aset)	
353.	Kepala Subbagian Data dan Informasi (RSU Adhyaksa)	
354.	Kepala Subbagian Keuangan (RSU Adhyaksa)	
355.	Kepala Subbagian Umum (RSU Adhyaksa)	
356.	Kepala Seksi Pelayanan Medik Umum, Spesialis dan Gawat Darurat (RSU Adhyaksa)	
357.	Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan (RSU Adhyaksa)	
358.	Kepala Seksi Forensik Klinik (RSU Adhyaksa)	
359.	Kepala Seksi Penunjang Klinik (RSU Adhyaksa)	
360.	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik (RSU Adhyaksa)	
361.	Kepala Seksi Kefarmasian (RSU Adhyaksa)	
362.	Kepala Subbagian Kepegawaian (Kejaksaan Tinggi)	
363.	Kepala Subbagian Keuangan (Kejaksaan Tinggi)	
364.	Kepala Subbagian Umum (Kejaksaan Tinggi)	
365.	Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan (Kejaksaan Tinggi)	
366.	Kepala Subbagian Perencanaan (Kejaksaan Tinggi)	
367.	Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (Kejaksaan Tinggi)	
368.	Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (Kejaksaan Tinggi)	
369.	Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan (Kejaksaan Tinggi)	
370.	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Kejaksaan Tinggi)	
371.	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen (Kejaksaan Tinggi)	
372.	Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kejaksaan Tinggi)	
373.	Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Kejaksaan Tinggi)	
374.	Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kejaksaan Tinggi)	
375.	Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Kejaksaan Tinggi)	
376.	Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
	Negara (Kejaksaan Tinggi)	
377.	Kepala Seksi Penyidikan (Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi)	9
378.	Kepala Seksi Penuntutan (Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi)	
379.	Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (Kejaksaan Tinggi)	
380.	Kepala Seksi Perdata (Kejaksaan Tinggi)	
381.	Kepala Seksi Tata Usaha Negara (Kejaksaan Tinggi)	
382.	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum (Kejaksaan Tinggi)	
383.	Kepala Seksi Penindakan (Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi)	
384.	Kepala Seksi Penuntutan (Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi)	
385.	Kepala Seksi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi (Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi)	
386.	Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum (Kejaksaan Tinggi)	
387.	Pemeriksa Intelijen (Kejaksaan Tinggi)	
388.	Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Kejaksaan Tinggi)	
389.	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Kejaksaan Tinggi)	
390.	Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Tinggi)	
391.	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan (Kejaksaan Tinggi)	
392.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Kejaksaan Tinggi)	
393.	Kepala Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam (Kejaksaan Tinggi)	
394.	Kepala Subbagian Pembinaan (Kejaksaan Negeri)	
395.	Kepala Seksi Intelijen (Kejaksaan Negeri)	
396.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kejaksaan Negeri)	
397.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kejaksaan Negeri)	
398.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Negeri)	
399.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kejaksaan Negeri)	
E	JABATAN PELAKSANA	
1.	Kepala Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai (Kejaksaan Tinggi)	8
2.	Kepala Urusan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai (Kejaksaan Tinggi)	
3.	Kepala Urusan Akuntansi dan Pelaporan (Kejaksaan Tinggi)	
4.	Kepala Urusan Anggaran, Perjalanan, Perbendaharaan, dan Pendapatan dan Piutang Negara (Kejaksaan Tinggi)	
5.	Kepala Urusan Rumah Tangga, Sarana Prasarana dan Kearsipan (Kejaksaan Tinggi)	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
6.	Kepala Urusan Perlengkapan dan Barang Milik Negara (Kejaksaan Tinggi)	8
7.	Kepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Kejaksaan Tinggi)	
8.	Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum (Kejaksaan Tinggi)	
9.	Kepala Urusan Persurutan (Kejaksaan Tinggi)	
10.	Kepala Urusan Distribusi dan Laporan (Kejaksaan Tinggi)	
11.	Kepala Urusan Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Kejaksaan Tinggi)	
12.	Kepala Urusan Keamanan Dalam (Kejaksaan Tinggi)	
13.	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Kejaksaan Negeri Tipe A)	
14.	Kepala Urusan Perlengkapan (Kejaksaan Negeri Tipe A)	
15.	Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Kejaksaan Negeri Tipe A)	
16.	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Kejaksaan Negeri Tipe B)	
17.	Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan (Kejaksaan Negeri Tipe B)	
18.	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum (Kejaksaan Negeri)	
19.	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis (Kejari)	
20.	Kepala Subseksi Prapenuntutan (Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri)	
21.	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi (Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri)	
22.	Kepala Subseksi Penyidikan (Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri)	
23.	Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi (Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri)	
24.	Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan Negeri)	
25.	Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum (Kejaksaan Negeri)	
26.	Kepala Urusan Pembinaan (Cabang Kejaksaan Negeri)	
27.	Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Cabang Kejaksaan Negeri)	
28.	Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Cabang Kejaksaan Negeri)	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN